

**PENGAWASAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN
ROKAN HILIR TERHADAP PEMBANGUNAN FISIK (STUDY KASUS
PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT KUBU BABUSSALAM TAHUN 2014)**

Oleh :

Wan Fadli

fadliskaters@rocketmail.com

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-6327

Abstract

The results showed that there are some things that impede the supervision of physical development that have an impact on the failure of the project to construct offices, the writer's observation of the surveillance of physical development can be categorized still very poor, because still lacking maximum performance of officers of Settlements and Spatial Rokan Downstream in carrying out surveillance in the physical development Babussalam Kubu district, and there are still factors - factors inhibiting the supervision of the physical development of the district office Babussalam camp, which is still a lack of human resources, funding / costs and infrastructure facilities.

In the process Supervision which sets standards, action judgments, take corrective action, and regular reports, based on the writer's observation, the authors assess is still not good, which is the case according to the authors present a problem in conducting surveillance measures or monitoring physical development in Kecamatan stronghold Babussalam rokan downstream district is only done once a month, and the absence of regular reports prepared by the department of copyrighted works and the district spatial rokan downstream towards the execution of physical development projects. So the impact on the failure of the project to construct offices Babussalam camp. Inside factors - factors inhibiting the supervision of the Department of Human Settlements and Spatial districts rokan downstream to the physical development, the constraints in terms of human resources are categorized still lack quality inspectors agency copyrighted works and spatial planning, in terms of salaries inspectors also minimal, and not the facility or vehicle completeness Department in monitoring the physical project to construct offices Babussalam stronghold Rokan Hilir.

Keywords: Surveillance Office of Human Settlements and Physical Development

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alat untuk melaksanakan pengawasan adalah perencanaan yang jelas, dan perencanaan yang tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan berarti timbulnya penyimpangan penyimpangan yang serius tanpa ada alat yang mencegahnya. Dari sejumlah proyek pembangunan di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, ada beberapa proyek pembangunan yang gagal dalam realisasinya yakni adalah proyek pembangunan Kantor Kecamatan Kubi Babussalam.

Meskipun proyek pembangunan Kantor Kecamatan Babussalam ini sudah selesai akan tetapi hasil pembangunan kantor kecamatan ini tidak dapat digunakan. Hal ini dikarenakan kondisi bangunan Kantor Kecamatan Kubu Babussalam dalam keadaan miring dan mengalami keretakan diberbagai sudut.

Menyikapi persoalan proyek pembangunan Kantor Kecamatan Kubu Babussalam ini, sayangnya telah dilakukan pengawasan namun pada realisasinya Kantor Kecamatan Kubu Babussalam ini tidak dapat ditempati dikarenakan kondisi bangunan yang memperhatikan, sehingga pelayanan pemerintahan di Kecamatan Kubu Babussalam kurang maksimal. Untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada pembangunan proyek Kantor Kecamatan Kubu Babussalam dalam tubuh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pengawasan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dalam Pembangunan fisik di Kabupaten Rokan Hilir (study pembangunan Kantor Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam pembangunan kantor Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam pembangunan kantor Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pembangunan kantor kecamatan kubu babusalam kabupaten rokan hilir.
 - b) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pembangunan kantor Camat kubu babusalam kabupeten rokan hilir.
2. Manfaat Penelitian
 - a) Kegunaan Secara Teoritis Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk melihat pengawasan pembangunan dan proses pelaksanaan serta penyebab terkendalanya pembangunan fisik dikecamatan kubu babusalam kabupaten rokan hilir.
 - b) Kegunaan Praktis Hasil dari penelitian ini dijadikan sebagai wahana untuk melatih diri serta memperluas wawasan sebagai bekal untuk menjalankan tugas selanjutnya.

D. Kerangka Teori

Menurut Brantas (2009:188) Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Senada dengan pengertian tersebut, Brantas (2009

: 195) menjelaskan ada tiga tahap dalam proses pengendalian :

1. Menentukan standar – standar yang akan digunakan

Penetapan standard dan metode untuk pengukuran kinerja bisa mencakup standard dan ukuran untuk segala hal, mulai dari target penjualan dan produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja. Untuk menjamin efektivitas langkah ini, standar tersebut harus dispesifikasikan dalam bentuk yang berarti dan diterima oleh para individu yang bersangkutan.

2. Mengukur hasil yang telah dicapai

Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dan repetitive, dengan frekuensi actual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang di ukur.

3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar

Membandingkan adalah membandingkan hasil yang telah di ukur dengan target atau standar yang ditetapkan. Apabila kinerja ini sesuai dengan standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali. Oleh karena itu, manajer tidak perlu campur tangan secara aktif dalam organisasi.

4. Mengambil tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan

Tindakan ini dilakukan manakala kinerja rendah dibawah standard an analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau beberapa aktivitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Fungsi Pengawasan

Di dalam pengawasan terdapat beberapa fungsi, fungsi pengawasan yaitu sebagai berikut :

- Tetapkan ukuran – ukuran.
- Monitor hasil – hasil dan dibandingkan dengan ukuran – ukuran.
- Perbaiki penyimpangan – penyimpangan.
- Ubah dan sesuaikan cara – cara pengawasan sehubungan dengan hasil – hasil pengawasan dan perubahan kondisi – kondisi.
- Berhubungan selalu selama proses pengawasan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi peneitian dilaksanakan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan manajemen pengawasan pembangunan fisik serta penyebab terkendalanya pembangunan kantor camat.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data. Langkah langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif adalah :

- 1) Tahap pengumpulan data
- 2) Tahap reduksi Tahap penyajian
- 3) Tahap penarikan
- 4) kesimpulan/verifikasi

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pencarian Data skunder data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama, sedangkan Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini menggunakan

teknik data Observasi (pengamatan) dan Wawancara.

4. Jenis Data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Antara lain : wawancara ataupun catatan tertulis. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Data Skunder

Data yang diperoleh dari intansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisa Data

Dalam penelitian jenis kualitatif ini peneliti menterjemahkan dan menguraikan data secara deskriptif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengawasan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir terhadap Pembangunan Fisik

Pengawasan mencakup suatu upaya dalam memeriksa apakah semua yang telah dikerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan dan direncanakan, pengawasan juga berfungsi untuk mencegah agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pengawasan Pembangunan yang dilakukan Kabupaten Rokan Hilir adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengembangan didalam melakukan pengawasan pembangunan, di Kabupaten Rokan Hilir pengawasan pembangunan fisik dilakukan oleh Dinas Cipta Karya untuk pelaksanaan dan

menjaga kestabilan dan lancarnya pembangunan fisik.

1. Menentukan Standar Pembangunan Kantor Camat Kubu Babussalam

a. Standar Kegiatan

Standar yang dimaksud disini adalah standar yang diterapkan atau dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan pengawasan pembangunan fisik di Kabupaten Rokan Hilir

Kutipan wawancara dengan Drs. IRWANDI, sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir, mengenai standar kegiatan.

'langkah audit atau seluruh pekerjaan fisik akan difokuskan dilapangan seperti melakukan perhitungan volume pekerjaan yang kita sesuaikan dengan data laporan yang kita terima. nantinya kita bisa mensinkronkan antara laporan yang kita terima dengan kondisi fisik dilapangan, untuk pembangunan kantor camat kubu babusalam, hasil pengecekan kondisi fisik dilapangan sesuai dengan laporanyang kita terima namun setelah beberapa saat setelah pengecekan dilapangan barulah kondisi fisik bangunan kantor camat menjadi miring seperti saat ini. hal ini terjadi dikarenakan kondisi tanah tidak sesuai dengan berat bangunan yang dikerjakan'(wawancara dengan sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 17 Oktober 2015)

Dari kutipan wawancara diatas, diketahui bahwa standar kegiatan dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik kantor camat kubu babusslam kabupaten rokan hilir tidak

sesuai dengan standar kerja. hal ini dibuktikan dengan miringnya bangunan kantor camat karna tidak maksimalnya pengerjaan proyek pembangunan kantor camat

b. Standar Waktu

Standar waktu adalah penentuan jadwal yan ditentukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pembangunan kantor. Standar waktu dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik dilakukan satu bulan sekali.

Berikut kutipan wawancara dengan BAPPEDA bagian Perencanaan teknis bangunan Bapak INDRA, Mengenai standar waktu dalam pengawasan pembangunan fisik di Kabupaten Rokan Hilir.

“standar waktu yang kami tentukan dalam pengawasan proyek pembangunan fisik yaitu 1 bulan sekali kami memantau perkembangan proyek pembangunan fisik proyek pembangunan fisik kantor camat dijadwalkan selama 90 hari kelender kerja namun kenyataan dilapangan melebihi waktu yang ditetapkan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain ketelambatan material proyek”(Wawancaradenganseksi perencanaan teknis bangunan BAPPEDA, 16 Oktober 2015)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas standar waktu yang ditentukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melakukan pengawasan waktunya 1 bulan sekali tetapi yang terjadi pada proyek pembangunan fisik kantor camat melebihi waktu yang telah ditentukan.

2. Melakukan Tindakan Penilaian dan Mengevaluasi Pembangunan Kantor Camat Kubu Babussalam

Sub indikator yang menjadi proses tindakan penilaian dan evaluasi adalah sebagai berikut :

a) Menilai Waktu

Dalam Menilai Waktu pengerjaan pelaksanaan pembuatan proyek pembangunan sangatlah diperhitungkan, karna waktu pengerjaan proyek telah ditetapkan oleh pembuat proyek. Oleh karna itu dalam proses pengerjaan pembangunan harus selesai tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh melebihi waktu yang telah ditentukan. Dan waktu pengawasan pembangunan juga dipantau yaitu 1 bulan sekali.

Kutipan wawancaradengan Bapak ROMI COSA,ST , mengenai waktu pengerjaan proyek pembangunan.

“terkait waktu yang digunakan dalam pengerjaan proyek pembangunan fisik kantor camat dilaksanakan selama 90 hari kelender apa bila waktu yang diberikan melebihi maka kami akan memberikan sanksi”(wawancara dengan Seksi Rancang Bangun, 17 Oktober 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas waktu dalam melakukan pengawasan pengerjaan proyek pembangunan fisik kantor camat melebihi ketetapan sehingga terjadi sanksi pada pemilik proyek.

b) Laporan Rutin

Kegiatan selanjutnya adalah laporan yang terkait dengan proses pembangunan proyek fisik kantor camat kubu babussalam sudah sesuai dengan target yang ditentukan atau ada hambatan-

hambatan yang terjadi dalam pengerjaan proyek pembangunan fisiknya.

Kutipan wawancara dengan pengawas proyek pembangunan kantor camat kubu babussalam.

“laporan rutin proyek pembangunan fisik kantor camat kubu babussalam dilakukan setiap waktu sehingga bisa terditeksi apa apa saja kejadian terkait pengerjaan proyek dilapangan laporan harus sesuai dengan pengerjaan proyek agar bentuk penyimpangan dapat diketahui dari adanya laporan rutin secara berkala”

Berikut kutipan wawancara dengan sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir Bapak IRWANDI

“terkait laporan mengenai pembangunan kantor camat kubu babussalam pada tahun 2012 terjadi permasalahan sehingga laporan tentang pembangunan kantor camat tidak ada diberikan kepada kami selaku Dinas terkait”

c) Menilai Kualitas

Proses penilaian kualitas adalah penilaian terhadap pengerjaan proyek pembangunan fisik kantor camat kubu babussalam apakah sudah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan

Berikut kutipan wawancara dengan anggota DPR JUANDA JUNET, SH, mengenai penilaian

kualitas proyek pembangunan kantor camat kubu babusallam.

“sama sama kita ketahui bahwa hasil pembangunan proyek kantor camat kubu tidak sesuai bahkan jauh dari harapan hal ini menjadi pelajaran bagi kami kedepannya untuk lebih mengawasi dengan teliti agar hal sedemikian tidak terulang pada proyek proyek pembangunan fisik selanjutnya”. (Wawancara dengan anggota DPR Rokan Hilir 12 Oktober 2015)

3. Melakukan Tindakan Perbaikan Hasil Pembangunan Kantor Camat Kubu Babussalam

Tindakan perbaikan disini adalah tindakan yang diambil untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dan pekerjaan yang dalam proses pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. dan jika terjadi penyimpangan-pinyampangan akan segera dilakukan tindakan perbaikan.

a) Memberikan Sanksi

Jika terdapat kesalahan yang terjadi dilakukan oleh petugas pengawasan dalam melaksanakan kegiatan memantau kondisi pengerjaan proyek pembangunan fisik kantor camat kubu babussalam akan dilakukan tindakan pemberian sanksi seperti teguran dan lainnya.

Kutipan wawancara bersama Bapak INDRA sebagai perencana program BAPPEDA mengenai bentuk sanksi.

“mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak kontraktor, pengawas

bangunan jika terjadi penyimpangan – penyimpangan dalam pengerjaan proyek pembangunan kantor camat kubu bentuk sanksi yang diberikan berupa teguran, dan pembatalan proyek semua tergantung kepada pimpinan”(Wawancara bersama pegawai BAPPEDA, 12 Oktober 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa jika terjadi penyimpangan – penyimpangan pada proyek pembangunan sanksi hanya diberikan jika pimpinan menghendaki.

- b) Menambah Jumlah Pengawas Penambahan jumlah pengawas hanya dilakukan jika diperlukan.

Berikut kutipan wawancara dengan KepalaDinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir,SUWANDI,S,SOS, mengenai jumlah pengawas.

“proyek pembangunan fisik kantor camat kubu babussalam diawasi oleh petugas yang telah ditentukan jumlah pengawas sudah sesuai dengan standar kerja ”.(wawancara dengan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 13 Oktober 2015)

B. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Proyek Pembangunan Fisik Kantor Camat Kubu Babussalam

Beberapa faktor yang menjadi penghambat pengawasan pembangunan tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pertama yang mempengaruhi penghambat pengawasan proyek pembangunan fisik kantor camat

kubu babussalam di kabupaten rokan hilir, artinya dilihat dari segi tingkat pengetahuan,kemampuan dan keahliannya yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, karena pengetahuan dan kemampuan adalah modal pertama dalam melaksanakan pengawasan pembangunan proyek fisik.

Berikut wawancara dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Cipta Karya. AULIA PUTRA, ST, mengenai sumber daya manusia pengawas.

“Dalam hal pengawasan bangunan kita sudah sudah menyiapkan urusan pengawasan bangunan kepada ahlinya tentunya disini kamilah sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam mengawasi proyek pembangunan kantor camat tersebut tapi kita terbatasnya aparatur dan sumber daya manusia pelaksana dalam pembinaan penyelenggara bangunan gedung termasuk pengawasan”(wawancara Bidang Cipta Karya, 14 Oktober 2015).

“Sejalan dengan pernyataan dari bapak aulia putra, st sebagai kepala bidang cipta karya kita sudah melakukan pengawasan sesuai prosedur yang ada, kita sudah menurunkan pegawai untuk mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan kantor camat kubu babussalam”(wawancara dari hasra darma putra, st sebagai Kasi Pengawasan Bangunan. romi cosa, st, sebagai kasi Rancang Bangunan, 14 Oktober 2015).

Kemampuan internal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam mewujudkan visi dan misi. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan

Hilir memiliki sumber daya manusia sebagai berikut :

Memiliki SDM sebanyak 132 orang dengan latar belakang pendidikan D3 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 20 orang. Dilihat dari status kepegawaian jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 63 orang dan sisanya adalah tenaga honorer. Untuk jabatan struktural eselon III/a dan III/b telah terisi sedangkan pada eselon IV/a dari jumlah jabatan yang tersedia sebanyak 15, yang terisi 15 orang dengan rincian 12 orang kasi Defenitif dan 3 orang Pelaksana Tugas (Plt) Kasi.

Dari segi kualitas Sumber Daya Manusia sangatlah berpengaruh di dalam melaksanakan pengawasan pembangunan kantor camat Kubu Babussalam. pendidikan yang dimiliki setiap pegawai sangat menentukan pola pikir pegawai. Semakin tinggi pegawai diharapkan semakin tinggi pula sumber daya kemampuan intelektual, keberhasilan dalam melaksanakan tugas lebih mudah dicapai

Kutipan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan seksi pengawas bangunan bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir mengenai kualitas Petugas Pengawasan.

“Kualitas pegawai memang kurang semenjak tidak adanya pelatihan-pelatihan, dulu banyak adanya pelatihan, apalagi tentang bangunan sudah sangat minim, dari segi pendidikannya banyak ditingkat SMA butuh waktu untuk mengambil pendidikan. Ini bisa juga menjadi salah satu penyebab tidak beresnya pembangunan kantor camat di Kecamatan Kubu Babussalam. Hal akan kita coba

perbaiki dan pelajari lagi.”(wawancara dengan Bapak Hasra darma putra, 14 Oktober 2015).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kualitas pegawai yang ada memang masih kurang, dengan kata lain Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir harus meningkatkan kualitas pegawai yang ada, agar dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dapat berjalan lancar, karena kualitas pegawai dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pengawasan.

2. Minimnya Fasilitas Pendukung Pengawasan Proyek Pembangunan Kantor Camat

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan, baik alat-alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Berikut ini kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Cipta Karya, AULIA PUTRA, ST, mengenai fasilitas yang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir.

“sarana dan prasarana penunjang pengawasan, proyek pembangunan kantor camat kubu babussalam sangatlah tidak memadai, disamping itu dihadapkan pada kondisi belum tersediannya data base keciptakaryaan untuk menunjang pelaksanaan pengawasan pembangunan kantor camat kubu babussalam, Minimnya ketersediaan fasilitas gedung dan peralatan pendukung dalam pelaksanaan tugas, yang menyebabkan terhambatnya proyek pembangunan kantor camat kubu babussalam.”(wawancara dengan

Kepala Bidang Cipta Karya, 14 Oktober 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai fasilitas yang ada pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir sangatlah memprihatinkan, karena fasilitas yang ada belum memadai. Hal tersebutlah yang mengakibatkan terhambatnya proses pengawasan proyek pembangunan

Dari sarana dan prasarana yang ada penulis melihat kendaraan yang ada tidak memenuhi syarat dalam melakukan pengawasan pembangunan proyek kantor camat di Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah kendaraan yang ada sangatlah berpengaruh dalam melaksanakan pengawasan yang mana para petugas yang akan turun kelapangan dalam mengawasi proyek pembangunan kantor camat akan menjadi terhambat. Jumlah kendaraan motor menurut tabel 3.3 hanyalah 2 unit saja, tetapi berdasakan kenyataan yang ada kendaraan yang ada tidak digunakan untuk petugas pengawas, tetapi digunakan untuk kegiatan lainnya.

untuk melakukan pengawasan proyek pembangunan kantor di Kecamatan kubu babussalam Kabupaten Rokan Hilir, yaitu 2 unit mobil dan 6 unit motor. Selain fasilitas berupa kendaraan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan proyek pembangunan kantor camat, petugas pengawasa juga membutuhkan peralatan yang digunakan untuk mengecek proyek pembangunan kantor camat, berikut alat-alat yang dibawa petugas pengawas didalam melakukan pengawasan proyek pembangunan kantor camat.

3. Tidak Trasparanya Dana/biaya Operasional Petugas Pengawasan Pembangunan Kantor Camat.

Faktor dana dalam melaksanakan pengawasan pembangunan sangatlah berperan dalam kelancaran proses pengawasan agar tercapainya tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Anggaran yang digunakan untuk kelancaran kegiatan pengawasan bangunan kantor camat kubu babussalam adalah anggaran operasional.

Berikut ini adalah kutipan wawancara penulis dengan seksi Pengawasan Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir Bapak HASRA DARMA PUTRA. mengenai anggaran dalam proyek pembangunan kantor camat dalam melaksanakan pengawasan.

“Biaya pengawasan pembangunan yang kami terima terbatas, tetapi pengawasan pembangunan sangat banyak diantaranya pengawasan pembangunan kantor camat kubu akses menuju kecamatan kubu masih sulit ditempuh memakan waktu perjalanan yang cukup lama ini menyebabkan pengawasan tidak efektif dan lemah serta memerlukan biaya operasional yang memadai”(wawancara dengan seksi pengawas bangunan, 14 Oktober 2015).

Berdasarkan wawancara diatas biaya operasional untuk para pegawai yang melakukan pengawasan pembangunan kantor camat kubu babussalam yang turun kelapangan masih terbatas, banyak pegawai yang meminta bonus dikarenakan akses untuk mencapai lokasi pembangunan kantor camat kubu babussalam masih sulit dijangkau sehingga dapat memakan waktu perjalanan yang sangat

lama. Oleh karena itu pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pengawasan meminta untuk menaikkan honor dalam melakukan pengawasan proyek pembangunan. Berikut tabel anggaran khusus yang dibutuhkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir untuk petugas pengawas yang melakukan pengawasan proyek kantor di Rokan Hilir.

Dari ketiga faktor – faktor penghambat pengawasan pembangunan fisik kantor camat kubu babussalam di Kabupaten Rokan Hilir, pada umumnya ketiga faktor ini dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan pengawasan pembangunan proyek kantor camat kubu babussalam, pertama dari segi sumber daya manusia, karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir dapat menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan pembangunan proyek kantor camat di lapangan/lokasi, apalagi sebagian besar pegawai yang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir hanyalah tamatan SMA dan masih minimnya kualitas pegawai yang ada belum memenuhi bagaimana cara melakukan pengawasan proyek pembangunan kantor yang dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir.

Kedua, dari segi fasilitas (sarana dan prasarana), fasilitas disini juga dapat menjadi penghambat pengawasan proyek pembangunan kantor camat karena dalam melakukan pengawasan kelapangan para pengawas memerlukan waktu yang sangat lama dikarenakan akses jalan yang rusak dengan tidak memakai

kendaraan milik kantor. terakhir yang ketiga adalah segi biaya operasional dalam melakukan pengawasan proyek pembangunan kantor camat, karena pada zaman saat ini tanpa adanya biaya operasional maka proses pekerjaan tidak akan berjalan dengan lancar, apalagi biaya operasional bagi para pengawas dibagikan per 5 bulan sekali, serta biaya perbulan yang diberikan sebesar Rp. 300.000 dan permintaan dari pegawai yakni sebesar Rp. 700.000 perbulannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didalam proses pengawasan yakni dalam menetapkan standar, melakukan tindakan penilaian, dan melakukan tindakan perbaikan berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis masih *kurang baik*, yang menjadi permasalahan menurut penulis sekarang ini masalah dalam melakukan tindakan pengawasan atau pun pemantauan proyek pembangunan kantor camat kubu babussalam di Kabupaten Rokan Hilir yang hanya dilakukan satu bulan sekali. Didalam faktor – faktor penghambat pengawasan pembangunan proyek kantor camat kubu babussalam di Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi kendala dari Sumber Daya Manusianya yang pertama yaitu dari segi kualitas para petugas pengawas yang dikategorikan masih minim dan dari segi honor nya, masih kurangnya honor pengawas serta tidak adanya kelengkapan fasilitas untuk melakukan pengawasan pembangunan kantor camat kubu babussalam di Kabupaten Rokan Hilir.

B. Saran

Sebaiknya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Rokan Hilir selalu tepat dan tegas dalam menjalankan tugas dan mengawasi pembangunan proyek fisik di Kabupaten Rokan Hilir dan mengevaluasi kembali hasil pembangunan kantor camat kubu babussalam agar terciptanya pembangunan yang baik dan merata sesuai dengan yang diinginkan. Dalam melakukan pembangunan selanjutnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang harus benar – benar teliti baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan dilapangan agar tidak terjadi lagi kasus seperti pembangunan kantor camat kubu babussalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Harlian. (2000). “Manajemen” Penerbit Alfabet, Bandung.
- Baldrik , Siregar, Bunni, Siregar (2004). “Dimensi Keruangan Kota”, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Brantas. (2009).”Dasar – Dasar Manajemen ” Alfabeta, Bandung.
- Darmayanti. (2007). “ Struktur Pengadilan Interen”, Rineka Cipta, Jakarta
- H. Emereson, (1998). “Perencanaan Kota”, Erlangga , Jakarta
- Hanif, Nurcholis. (2007). “ Retventing Pembangunan” Alex Media Kompetida, Jakarta
- Hasibuan, (1995). “Manajemen Pembangunan Kota” Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Kaho. (1998).”Manajemen PembangunanIndonesia”,PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Rasyid. (2004). ”Dasar- Dasar Pengawasan”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salam, (2004). “ Sistem Pengendalian Manajemen”, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sarwono, (2003),” Sistem Pengawasan Manajemen”, Pustaka Kuantum, Jakarta.
- Sukanto, (2002),” Tata Ruang Pembangunan Daerah”,Gajah Mada, University Press.
- Arikunto. 2003. MetodologiPenelitianKualitatif. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Cokroamidjojo, Bentoro. 2006, Rangkuman Temu Wicara Ilmiah.Bandung: STIALAN RI
- Skirpsi
- Helmi Hadi,2013, PengawasanPemerintah Daerah Dalam Pembangunan Fisik, JurusanIlmuPemerintahan, FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik, Universitas Riau.